

Akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Tahun 2021-2022

M Syaepudin^{1*)}, Amanda Jesica Loren²⁾, Ismalia Nur Hidayah³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha, Kota Serang

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha, Kota Serang

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha, Kota Serang

Article History:

- received September 2024
- accepted September 2024

Abstract. Financial Accountability of the Sekretariat DPRD kabupaten serang in 2021-2022.” This study aims to determine the Financial Accountability of the Sekretariat DPRD kabupaten serang in 2021-2022 and to determine the factors that influence the improvement of the Financial Accountability of the Sekretariat DPRD kabupaten serang. The research method used is a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The data used is primary data obtained directly from informants. The results of the study indicate that the research that has been conducted at the Sekretariat DPRD kabupaten serang in 2021-2022, it can be concluded that the budget absorption of the Sekretariat DPRD kabupaten serang from 2021-2022 experienced a decrease in budget absorption from 2021 by 98.92% to 90.96% in 2022.

Keyword: Financial Accountability; Sekretariat DPRD; Kabupaten Serang

*Corresponding author. E-mail: spudin685@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia juga sekarang ini adalah menguatkannya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah berhak untuk memperoleh informasi sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, dipublikasikan laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara

lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi. Belum optimalnya akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang tersebut disebabkan: Rendahnya akuntabilitas keuangan yang mengakibatkan suatu kegagalan administrasi dan Akuntabilitas yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian ini, hal yang akan diteliti adalah mengenai akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas juga adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini juga harus dipegang erat oleh suatu perusahaan agar setiap karyawannya dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan tersebut mudah tercapai. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Tahun 2021-2022."

2. METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Sugiarto (2022:30) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang membahas tujuan penelitian melalui berbagai teknik yang memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap fenomena yang menjadi perhatian tanpa tergantung pada pengukuran numerik. Kelebihan dari metode penelitian kualitatif yaitu deskriptif dan interpretasi dari informasi dapat diteliti secara mendalam, dan afektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung dengan informan. Untuk mengatasi hal tersebut penulis memberikan solusi dalam meneliti yaitu penulis harus benar-benar mendalami secara efektif hal yang sedang diteliti supaya hasil dalam penelitian tersebut benar-benar sesuai dengan realita yang ada dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Bachtiar (2021:88) objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud pengertian objek penelitian adalah suatu sifat atau keadaan dari orang, benda atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Serang. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi (Sugiyono: 2020 104-105).

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data:

Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah penelitian mengumpulkan data teks deskriptif dengan mengamati orang dan perilaku mereka pada peristiwa atau dalam pengaturan alami mereka. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2016:9) deskriptif kualitatif mencoba metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), Analisa data bersifat induktif kualitatif. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian; (2) Menyeleksi data dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan; (3) Membuat Analisa pengguna, lalu mengambil data instansi; (4) Membuat kesimpulan akhir dari penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten Serang termasuk kedalam Provinsi Banten. Namun seiring berjalannya waktu, Kabupaten Serang selanjutnya dimekarkan menjadi dua wilayah otonomi, yakni: Kabupaten Serang dan Kota Serang berdasarkan UU No 32 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 agustus 2007. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Serang seperti yang diacuh dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan memperhatikan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Serang: (1). Visi: Terwujudnya Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mensukseskan visi dan misi Kabupaten Serang; (2) Misi: a. meningkatkan fungsi

legislatif secara proaktif dan aspiratif untuk kepentingan masyarakat. B). meningkatkan fungsi dan anggaran dengan berorientasi pada pemenuhan dasar masyarakat. C). meningkatkan fungsi DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan, dengan memperhatikan hak dan kewajiban Lembaga dan anggota DPRD.

Adapun komposisi dan jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang tahun 2021 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Menurut Golongan

Jabatan	Golongan Ruang dan Kepangkatan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Skretaris	-	-	-	1	1
Kepala Bagian	-	-	2	2	4
Kepala Sub Bagian	-	-	10	1	11
Pelaksana	-	6	7	-	13
Total	-	6	19	4	29

Penyajian Data Terkait Topik Penelitian. Dari data penelitian diperoleh melalui observasi untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas keuangan di Instansi Sekretariat Kabupaten Serang.

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran tentang tercapainya serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya. Akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten di susun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang di lakukan pemerintah daerah selama satu priode pelaporan, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dan membantu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan menyediakan informasi mengenai: (1) Penerima periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (2) Cara memperoleh sumber daya ekonomi yang di gunakan dalam kegiatan serta nilai yang dicapai; (3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai; (4) Bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) Posisi keuangan dan kondisi terkait dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, baik yang berasal dari pendapatan dari daerah maupun dana transfer dan lain-lain yang pendapatan sah; (6) Perubahan posisi keuangan sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Akuntabilitas keuangan sekretariat DPRD Kabupaten serang tahun 2022. Ini diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Serang secara keseluruhan. Dalam membaca akuntabilitas keuangan tersebut diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat diantara komponen-komponen akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan

Keuangan Ekuitas (LPE), merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang terlampir pada neraca 2021 dan 2022. Selain itu catatan atas akuntabilitas keuangan ini merupakan penjelasan atas Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang adalah sebagai berikut: (a) Hambatan yang dapat terkendali: 1. Volume kegiatan yang relative cukup besar; 2. Waktu yang tidak cukup, sedangkan rencana kegiatan masih ada yang belum dilaksanakan, artinya antara kegiatan dengan waktu yang tidak sesuai; 3. Kurangnya tenaga kerja administrasi yang menguasai hal-hal teknisnya, karena itu dibutuhkan penambahan pegawai; 4. Sering terjadi benturan dalam hal waktu kegiatan antara sekretariat DPRD sebagai OPD yang punya kegiatan tersendiri dan sebagai fasilitator DPRD; 5. Keadaan kas daerah yang terbatas. (b) Hambatan yang tidak dapat terkendali: 1. Tidak konsistennya program dan kegiatan yang telah ditetapkan; 2. Peraturan atau undang-undang yang sering berubah yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Kepekaan, kemampuan dan kecemasan sumber daya manusia yang memadai baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban; 4. Adanya perbedaan kebijakan antara pengelola kegiatan dengan anggota dewan.

Realisasi Anggaran

Perbandingan realisasi anggaran kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Serang selama tahun anggaran 2021 dan 2022 antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat dari presentase. Yang mana dalam pencapaian tersebut dapat dilihat pada pengukuran pencapaian sasaran (pps).

Tabel 2. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2022

SKPD	NAMA BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
SET. DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab	53.938.984.781	50.052.024.250	92,79%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	49.977.616.722	44.472.074.145	88,98%

Sumber: LKIP Tahun Anggaran 2022

Tabel 3. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2021

SKPD	NAMA BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
SET. DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab	57.068.414.840	53.703.975.373	94,10%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	37.966.991.300	32.665.706.389	86,04%

Sumber: LKIP Tahun Anggaran 2021

Pembahasan Terkait Rumusan Masalah Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan terkait rumusan masalah yaitu: “Bagaimana serapan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Tahun 2021-2022” Untuk perbandingan akntabilitas keuangan kegiatan tahun anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten

Serang dapat dilihat serapan anggranya yakni dari pagu sebesar Rp. 103.916.601.503 dengan terealisasi sebesar Rp. 94.542.098.395 (90,96%), dengan rincian yang sudah disediakan pada bagian sebelumnya. Sebagai perbandingan akuntabilitas keuangan, dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut: Akuntabilitas keuangan serapan anggaran dan realisasi program dapat dilihat melalui tahun anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Serang dengan jumlah anggaran belanja langsung yaitu sebesar Rp. 73.575.097.600 dan realisasi Rp. 67.412.342.564 (91,62%) dan DPRD sebesar Rp. 30.768.039.000 dengan realisasi Rp. 30.435.848.244 (98,92%) dengan rincian yang sudah disediakan pada bagian sebelumnya. Dari uraian diatas pada 2022 ini terdapat serapan anggaran dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 serapannya sebesar (98,92%) sedangkan 2021 ini serapannya sebesar 90,96%.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang pada tahun 2021-2022, maka dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Serang dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan serapan anggaran dari tahun 2021 sebesar 98,92% menjadi 90,96% pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penulis dalam menyusun penelitian ini serta terdapat banyaknya kekurangan. Maka peneliti dapat memberikan saran bagi beberapa pihak agar dapat lebih baik lagi. Berikut saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. Bagi Instansi Dari penelitian ini penulis dapat menyarankan kepada instansi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pengelolaan terkait akuntabilitas keuangan yang optimal agar instansi tersebut terhindar dari masalah keuangan. Serta instansi harus memperhatikan akuntabilitas instansi melalui variabel yang berpengaruh pada akuntabilitas keuangan. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Dari penelitian ini penulis dapat menyarankan kepada peneliti selanjutnya menambahkan data penelitian, juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber akuntabilitas keuangan serta objek penelitian ini diperluas dan tidak terbatas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang

DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, Febriana F. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4.3 (2016).
- Din, Muhammad. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media. 2022
- <http://repository.stei.ac.id/11095/4/BAB%20III.pdf>
- <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>
- <http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf>
- <https://diklatlpkn.id/2023/06/07/peran-standar-akuntansi-pemerintah-pusat-berbasis-akrual-dalam-membangun-kepercayaan-publik-melalui-akuntabilitas-keuangan/>
- [https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=27033&bid=11511-~:text=Menurut%20Hardani%20\(2020\)%20menyatakan%20bahwa%20data%20sekunder%20adalah%20data%20yang.go.id%2Fcfs](https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=27033&bid=11511-~:text=Menurut%20Hardani%20(2020)%20menyatakan%20bahwa%20data%20sekunder%20adalah%20data%20yang.go.id%2Fcfs)

- [https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/599/4/NINING CHASANAH_BAB III_PGSD2021.pdf](https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/599/4/NINING_CHASANAH_BAB_III_PGSD2021.pdf) LAILATUL
- https://www.google.com/search?q=akuntabilitas+keuangan&rlz=1C1SQJL_enID980ID980&oq=AKU&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGDkyBggCEEUYOzINCAMQABiDARixAxiABDINCAQQABiDARixAxiABDINCAUQABiDARixAxiABDINCAAYQABiDARixAxiABDINCAcQABiDARixAxiABDIKCAgQABixAxiABDINCAkQABiDARixAxiKBdIBDzi2NzUyNjQwMzdqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Idawati, Wiwi. "Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan." *Equity* 22.2 (2019): 153-172.
- Kusuma, Marhaendra. "Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah." *Cahaya aktiva* 2.02 (2012): 1-13
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022.